

**PENGARUH PENYAJIAN, AKSESIBILITAS DAN LATAR BELAKANG  
PENDIDIKAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN**

**(Studi Empiris pada DPRD Kota Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program S1 Akuntansi*



**Oleh:**

**Soni Putra Abadi**

**1107598/2011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PENYAJIAN, AKSESIBILITAS DAN LATAR BELAKANG**  
**PENDIDIKAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**  
**DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN**  
**DAERAH**

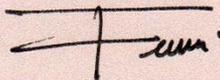
(Studi Empiris Pada DPRD Kota Padang)

Nama : Soni Putra Abadi  
BP/NIM : 2011/1107598  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2015

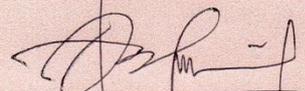
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



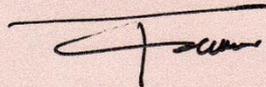
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213199903 1 003

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si.  
NIP. 19740303200812 2 001

Ketua Prodi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213199903 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas dan Latar Belakang Pendidikan Pengguna Laporan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota Padang)

**Nama** : Soni Putra Abadi

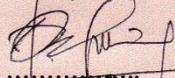
**BP/NIM** : 2011/1107598

**Program Studi** : Akuntansi

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, November 2015

**Tim Penguji**

<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. .... 
2. Sekretaris : Halmawati, SE, M.Si	2. .... 
3. Anggota : Vita Fitria Sari, SE, M.Si	3. .... 
4. Anggota : Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	4. .... 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soni Putra Abadi  
NIM/Thn. Masuk : 1107598/2011  
Tempat/Tgl Lahir : Pariaman/05 Desember 1992  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln. Gajah VII No.17A, Air Tawar Barat, Padang Utara  
No. HP/Telp : 082283816607  
Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas dan Latar Belakang Pendidikan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota Padang)”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah, apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, November 2015

Yang menyatakan,



**Soni Putra Abadi**  
NIM. 2011/ 1107598

## ABSTRAK

**Soni Putra Abadi, 1107598/2011. PENGARUH PENYAJIAN, AKSESIBILITAS DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

**Pembimbing : 1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, AK  
2. Halmawati, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, (2) Pengaruh aksesibilitas terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dan (3) Pengaruh latar belakang pendidikan pengguna terhadap penggunaan informasi keuangan.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Kota Padang, Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *total sampling* dengan jumlah responden sebanyak 45 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan analisis jalur (*path analysis*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: (1) penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan, (2) Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan dan (3) Latar belakang pendidikan pengguna tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan.

**Kata kunci: penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas, latar belakang pendidikan, penggunaan informasi keuangan**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGARUH PENYAJIAN, AKSESIBILITAS DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis dibimbing dan dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan ibu Halmawati, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si dan ibu Mayar Afrienti SE,M.Sc selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang. Serta Kakak Syamsariani selaku tenaga administrasi program studi Akuntansi.

5. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak selaku pembimbing akademik.
6. Staf dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Harmiadi dan Ibu Neti Hariani, kakak Ria Fitrianti dan adik Diki Aulia Putra yang tiada henti-hentinya berdoa, memotivasi, dan memberi semangat untuk selalu bangkit serta mencurahkan segala perhatiannya bagi penulis.
9. Sahabat Mancor Management, Raga Cipta Prakasih, Derta Jouyang, Yogi Afriandi, Randu Darmawan, Rahmad Efendi, Adrisoni dan Rabbani Angkasa serta Ikatan Cik Uniang Cik Ajo Kabupaten Padang Pariaman yang tiada henti-hentinya berdoa, memberikan semangat dan bantuan baik moral maupun materi untuk selalu bangkit, serta mencurahkan perhatiannya bagi penulis.
10. Semua sahabat seperjuangan di kos PAKWO atas yang sama-sama berjuang memotivasi, saran, dukungan, serta bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
11. Semua sahabat seperjuangan di Prodi Akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis telah melakukan yang terbaik dalam proses penyusunan skripsi ini, namun kritik dan saran tetap sangat penulis harapkan demi perbaikan kearah yang lebih baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, November 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b><u>ABSTRAK</u></b> .....	<b><u>i</u></b>
<b><u>KATA PENGANTAR</u></b> .....	<b><u>ii</u></b>
<b><u>DAFTAR ISI</u></b> .....	<b><u>v</u></b>
<b><u>DAFTAR TABEL</u></b> .....	<b><u>vii</u></b>
<b><u>DAFTAR GAMBAR</u></b> .....	<b><u>viii</u></b>
<b><u>DAFTAR LAMPIRAN</u></b> .....	<b><u>ix</u></b>
<b><u>BAB I PENDAHULUAN</u></b> .....	<b><u>1</u></b>
<u>A.Latar Belakang Masalah</u> .....	<u>1</u>
<u>B.Rumusan Masalah</u> .....	<u>7</u>
<u>C.Tujuan Penelitian</u> .....	<u>7</u>
<u>D.Manfaat Penelitian</u> .....	<u>7</u>
<b><u>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS</u></b> .....	<b><u>9</u></b>
<u>A.Kajian Teori</u> .....	<u>9</u>
<u>1.penggunaan informasi keuangan</u> .....	<u>9</u>
<u>2.penyajian laporan keuangan daerah</u> .....	<u>23</u>
<u>3.aksesibilitas laporan keuangan</u> .....	<u>27</u>
<u>4.latar belakang pendidikan pengguna</u> .....	<u>30</u>
<u>B.Evaluasi Penelitian Terdahulu</u> .....	<u>31</u>
<u>C.Hubungan Antar Variabel</u> .....	<u>33</u>
<u>D.Kerangka Konseptual</u> .....	<u>36</u>
<u>E.Hipotesis</u> .....	<u>37</u>
<b><u>BAB III METODE PENELITIAN</u></b> .....	<b><u>38</u></b>
<u>A.Jenis Penelitian</u> .....	<u>38</u>
<u>B.Populasi dan Sampel</u> .....	<u>38</u>
<u>C.Jenis Data dan Sumber Data</u> .....	<u>39</u>
<u>D.Instrumen Penelitian</u> .....	<u>40</u>
<u>E.Uji Validitas dan Reliabilitas</u> .....	<u>41</u>
<u>F.Model dan Teknis analisis data</u> .....	<u>42</u>
<u>G.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel</u> .....	<u>48</u>

<b><u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</u></b>	<b><u>49</u></b>
<u>A.Gambaran Umum .....</u>	<u>49</u>
<u>B.Demografi Responden .....</u>	<u>50</u>
<u>C.Deskripsi Variabel Penelitian .....</u>	<u>51</u>
<u>D.Statistik Deskriptif .....</u>	<u>55</u>
E. Uji Validitas dan Rebiabilitas.....	57
F. Uji Asumsi Klasik.....	59
G. Uji Model.....	62
H. Pembahasan.....	66
<b><u>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</u></b>	<b><u>71</u></b>
<u>A.Kesimpulan .....</u>	<u>71</u>
<u>B.Keterbatasan Penelitian .....</u>	<u>72</u>
<u>C.Saran .....</u>	<u>73</u>
<b><u>DAFTAR PUSTAKA.....</u></b>	<b><u>74</u></b>

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama DPRD Kota Padang 2014-2019 .....	38
Tabel 2 Alternatif Jawaban .....	40
Tabel 3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	41
Tabel 4 Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner.....	46
Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	50
Tabel 6 Penggunaan Informasi Keuangan .....	51
Tabel 7 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	52
Tabel 8 Aksesibilitas Laporan Keuangan .....	54
Tabel 9 Latar Belakang Pendidikan Pengguna.....	55
Tabel 10 Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 11 Nilai <i>Corrected item</i> .....	57
Tabel 12 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> .....	58
Tabel 13 Uji Normalitas Residual.....	59
Tabel 14 Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel 15 Uji Heterokedastisitas.....	61
Tabel 16 Uji F.....	62
Tabel 17 Uji Koefisien Determinasi .....	63
Tabel 18 Regresi Berganda.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	37
------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner.....	76
Lampiran 2 Tabulasi Uji Validitas .....	79
Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	80
Lampiran 4 Tabulasi Penelitian .....	84
Lampiran 5 Analisis Data Penelitian.....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan isu yang sangat menarik saat ini. Seringkali laporan keuangan pemerintah daerah disajikan hanya untuk memenuhi fungsi pertanggungjawaban saja, padahal laporan keuangan pemerintah daerah harus digunakan sebagai media perencanaan, manajerial dan pengawasan (Hapsari, 2008).

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan penggunaan informasi keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah memaksa pemerintah untuk melakukan transparansi kepada publik, serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik. Kurangnya pemerintah dalam memberikan informasi keuangan untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Penggunaan informasi laporan keuangan daerah berkaitan dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan

transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Penggunaan informasi keuangan daerah penting dilakukan karena para pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis. Dengan mengetahui kondisi keuangan daerah, maka kecurangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dapat diminimalisir, setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat terpantau dan diharapkan dapat disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam laporan keuangan daerah.

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002). Berdasarkan Deniski (1973) dalam Sujana (2002), bahwa banyak jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermacam kepentingan, oleh karena itu sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua jenis pengguna.

Para pengguna laporan keuangan baik pihak eksternal maupun internal diharapkan untuk paham dan mengerti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, agar lebih mudah dalam menerjemahkan apa yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemakai laporan keuangan yang paham informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih mudah untuk menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan maupun untuk melakukan analisis-analisis yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah, apabila pengguna informasi laporan keuangan daerah tidak paham tentang laporan

keuangan daerah, maka pengguna cenderung tidak akan menggunakan informasi keuangan daerah dengan maksimal.

Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan.

Pemerintah harus dapat meningkatkan penggunaan informasi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006). Dengan kata lain, Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap maksimalnya penggunaan informasi laporan keuangan daerah.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke

DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah.

Selain itu, lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) pemerintahan terhadap akuntansi pemerintahan itu sendiri menjadi masalah yang tidak bisa dihindarkan dalam penggunaan laporan keuangan Pemda (Hapsari, 2008).

Latar belakang pendidikan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah (Martiningsih, 2009). Latar belakang pendidikan seorang pengguna laporan keuangan pemerintah dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Menurut Fontanella (2012) pengetahuan akuntansi mempunyai pengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan, sehingga pengetahuan mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat mengambil keputusan yang berkualitas. Diharapkan pengguna laporan keuangan pemerintah dapat memanfaatkan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Hasil penelitian di Swedia menunjukkan bahwa pengguna tidak memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah karena beban kerja yang berat dan ketidakpahaman mereka atas informasi akuntansi akrual yang tersedia (Paulsson, 2006 dalam Fontanella, 2010).

Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai

bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Terwujudnya penggunaan informasi keuangan merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Hal ini bisa dilihat dari kematangan perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pengguna informasi keuangan. Secara umum penggunaan informasi keuangan diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempublikasikan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik.

Namun dalam kenyataannya, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Padang belum menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2014 secara maksimal. Ini terbukti dengan dinaikkannya target pendapatan untuk semua SKPD di wilayah Kota Padang, hal ini disampaikan langsung oleh Wahyu Iramana Putra selaku Koordinator Badan Anggaran (Banggar), padahal menurut Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang Fuji Astomi mengatakan bahwa ditahun 2014 ada tiga SKPD yang tingkat realisasi pendapatannya di bawah 50%, ketiga SKPD itu adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang realisasi pendapatannya hanya sebesar Rp341.000.000 dari target Rp900.000.000, kemudian Dinas Pasar yang hanya

mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp2.840.000.000 dari target Rp18.000.000.000, dan terakhir Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) yang merealisasikan pendapatan sebesar Rp12.500.000 dari target Rp39.000.000. Seharusnya ketiga SKPD ini tidak dinaikkan target pendapatannya pada tahun 2015, mengingat realisasi pendapatannya pada tahun sebelumnya kurang dari 50%. (*Sumber: ANTARA SUMBAR*)

Selain permasalahan diatas, APBD Kota Padang juga menganggarkan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 sebesar Rp200.000.000.000. Sedangkan menurut Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan, Zulhardi Z Latif mengatakan besarnya SiLPA APBD Kota Padang 2015 yang mencapai Rp200.000.000.000 itu membuktikan banyaknya kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana, padahal anggaran untuk belanja Kota Padang tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan secara efektif sehingga diakhir periode tidak terdapat SiLPA yang begitu besar.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ini guna mengetahui bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan latar belakang pendidikan pengguna terhadap penggunaan informasi laporan keuangan daerah berdasarkan fenomena yang terjadi dari uraian diatas, maka penulis berminat melakukan penelitian di Kota Padang dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas, dan Latar Belakang Pendidikan Pengguna Laporan**

## **Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan (Studi Empiris pada DPRD Kota Padang)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana penyajian laporan keuangan daerah dapat mempengaruhi penggunaan informasi keuangan?
2. Sejauhmana aksesibilitas laporan keuangan daerah dapat mempengaruhi penggunaan informasi keuangan?
3. Sejauhmana latar belakang pendidikan pengguna dapat mempengaruhi penggunaan informasi keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan pengguna terhadap penggunaan informasi keuangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Padang

Sebagai masukan bagi DPRD untuk mengoptimalkan penggunaan informasi laporan keuangan pemerintah.

2. Bagi pembaca dan peneliti lain

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan latar belakang pendidikan pengguna terhadap penggunaan informasi keuangan daerah

3. Bagi peneliti

- a. Menambah pengetahuan peneliti mengenai topik yang diteliti.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah**

###### **a. Laporan Keuangan Daerah**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, sekarang ini pada setiap daerah dibentuk Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja yang sebagian juga berperan dalam pembuatan laporan keuangan daerah (Ramadhani, 2013)

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan (Rohman, 2009)

###### **b. Komponen-komponen Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

###### 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,

dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan (PP No 71 Tahun 2010). Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk

dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

## 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya (PP No. 71 Tahun 2010)

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

### 3) Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
- b) LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
- c) Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode

bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

- a) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- b) Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

#### 5) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

#### 6) Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk

memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

## 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang

dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut.

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive* atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

### **c. Tujuan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah**

Adapun tujuan dari pelaporan keuangan ini berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, alinea 9, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos pos berikut : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Ada beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 alinea 36 (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) dinyatakan bahwa pengguna atau pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan
4. Pemerintah

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih

penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 dalam Bandary 2011).

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan (Rohman, 2009)

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pmda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan.

## **2. Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010).

Berdasarkan pada *Impossibility Theory* (Deniski, 1973 dalam Sujana, 2002), bahwa sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua kelompok pengguna yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Oleh karena itu Wilson and Kattelus (2002) dalam Rohman (2009) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan harus: Menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dana dan aktivitas dari unit pemerintah sesuai dengan GAAP; dan menentukan dan membuktikan kesesuaian dengan peraturan

keuangan yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada, masyarakat, para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan pemerintah

#### **a. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

- 1) Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.
- 2) Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.
- 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- 4) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus, tujuan khusus penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

#### **b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

### 1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### 3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

#### a. Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley *et al*, 1990, dalam rohman, 2009).

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) (Kawedar, 2008).

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33

Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009).

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penggunaan informasi laporan keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam

demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Menurut Yani (2009), pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

#### **b. Bentuk Aksesibilitas Laporan Keuangan**

SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
2. Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah
3. *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

#### **4. Latar Belakang Pendidikan Pengguna**

Di dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Robbins (2006) dalam Fontanella (2010) kemampuan sumber daya manusia diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu, sehingga setiap individu memiliki kemampuan intelektual yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Pendidikan

menumbuhkan kemampuan untuk menimbang dan memilih informasi. Selanjutnya membentuk informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan (Libby, 1995). Menurut Gibbins (1984) pendidikan sebagai unsur pengetahuan, dapat memberikan kemampuan mengolah informasi, membandingkan solusi dari berbagai alternatif, dan mengambil tindakan. Sedangkan menurut Bonner dan Lewis (1990) penyeleksian dan pembobotan nilai informasi tergantung dari pengetahuan, sehingga pendidikan pengguna laporan keuangan pemerintah berperan penting dalam menentukan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian.

Latar belakang pendidikan seorang pengguna laporan keuangan pemerintah dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Menurut Fontanella (2012) pengetahuan akuntansi mempunyai pengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan, sehingga pengetahuan mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat mengambil keputusan yang berkualitas. Diharapkan pengguna laporan keuangan pemerintah dapat memanfaatkan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa ahli. Seperti yang pernah dilakukan oleh Bandary (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di Kabupaten Banyumas”, hasilnya menunjukkan

bahwa penyajian dan aksesibilitas sama-sama berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas

Selain itu, dengan judul yang sama pada penelitian Sujana (2014) mendapatkan hasil bahwa penyajian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan di Kabupaten Buleleng, begitu pula dengan aksesibilitas yang juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan.

Penelitian dari Adisti (2013) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di Kota Tasikmalaya”, juga menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan disana, begitu pula dengan aksesibilitasnya.

Ramadhani (2013) juga mengemukakan hasil yang senada lewat penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah”. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan provinsi Riau.

Sementara penelitian untuk variabel latar belakang pendidikan pengguna terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pernah dilakukan oleh Fontanella (2010) dengan judul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna terhadap Pemanfaatan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pengguna berpengaruh positif terhadap pemanfaatan informasi laporan keuangan di Kabupaten Agam.

Hal ini sejalan dengan penelitian Martiningsih (2009) yang berjudul “Analisis Kebutuhan Informasi Pemerintahan: Studi Pelaporan Keuangan Pemerintah” yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan serta latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap informasi pengguna laporan keuangan pemerintah.

### **C. Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Penyajian dan Penggunaan Informasi Laporan Keuangan**

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik. Bagaimana penilaian tanggung jawab itu selanjutnya kita kembalikan lagi kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil *feedback* dari pengguna informasi atas penyajian laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

## **2. Aksesibilitas dan Penggunaan Informasi Laporan Keuangan**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley *et al*, 1990, dalam Rohman, 2009).

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan pertanggungjawabannya, tidak hanya disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibilitas pada pengguna potensial (Jones *et al.*, 1985 dalam Mulyana 2006). Oleh karena itu, pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah.

### **3. Latar Belakang Pendidikan Pengguna dan Penggunaan Informasi Laporan Keuangan**

Pemahaman terhadap akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan laporan keuangan pemerintah. Hapsari (2008) memaparkan bahwa rendahnya pemahaman SDM terhadap akuntansi pemerintahan berdampak pada kurangnya kebermanfaatan laporan keuangan audit BPK.

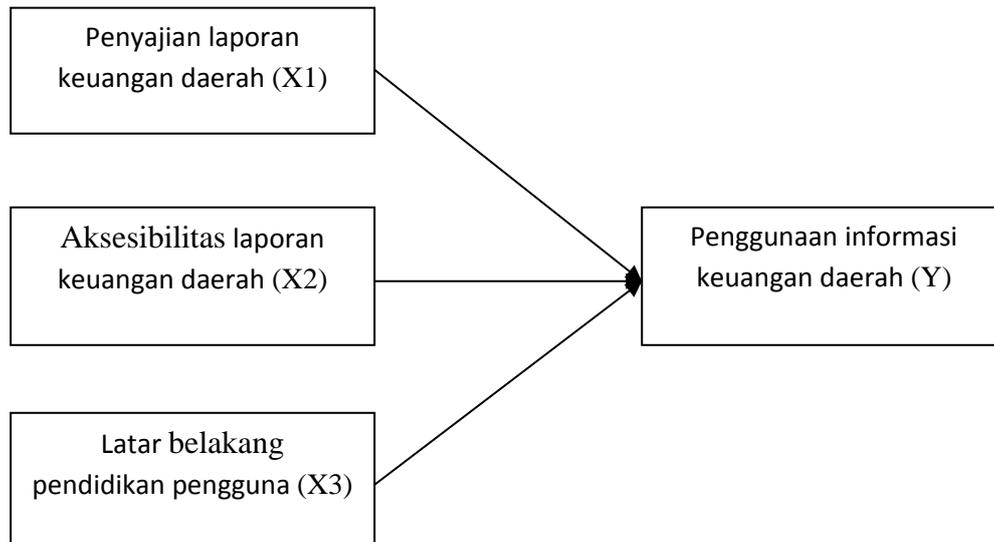
Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Paulsson (2006) yang menyebarkan kuisioner dan mewawancarai pengguna laporan keuangan di Swedia dan menarik kesimpulan bahwa manager senior tidak menggunakan informasi akuntansi akrual ketidapkahaman mereka atas informasi akuntansi akrual yang disajikan. Nazier (2009) dalam Fontanella (2010) juga menemukan bahwa tingkat pemahaman staf tentang keuangan dan akuntansi masih minim.

Pengguna laporan keuangan akan memanfaatkan informasi yang ada pada laporan keuangan jika mereka memahami informasi yang tersedia tersebut.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yaitu antara variabel dependen dan variabel-variabel independen yang akan diteliti berdasarkan batasan rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

Kaitan antara variable-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teori dan kerangka konseptual diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
- H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
- H3: Latar belakang pendidikan yang dimiliki pengguna laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian pengaruh penyajian, aksesibilitas dan latar belakang pendidikan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah terhadap penggunaan informasi keuangan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah kota Padang, hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan kota Padang dapat meningkatkan penggunaan informasi keuangan oleh anggota DPRD.
2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan oleh DPRD kota Padang, hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam mendapatkan laporan keuangan tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam penggunaan informasi keuangan oleh anggota DPRD.
3. Latar belakang pendidikan pengguna laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan kota Padang, hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan anggota DPRD tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam penggunaan informasi keuangan, karena ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan penggunaan informasi keuangan seperti pengalaman pengguna laporan keuangan daerah.

## **B. Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian mengenai pengaruh penyajian, aksesibilitas dan penggunaan informasi keuangan oleh DPRD kota Padang, antara lain:

1. Wilayah penelitian hanya terbatas pada DPRD kota Padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Dari model penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan bahwa kontribusi variabel penyajian, aksesibilitas dan latar belakang pendidikan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 63,3%, sedangkan selebihnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini sehingga dimungkinkan adanya variabel lain yang mempengaruhi penggunaan informasi keuangan.
3. Penyebaran kuesioner pada dewan perwakilan rakyat daerah kota Padang tidak dapat dilakukan secara keseluruhan hal ini disebabkan karena beberapa anggota DPRD tidak bisa memberikan pendapat atau opini melalui kuesioner yang disebar dengan alasan kesibukan dan karena sedang melakukan dinas luar.
4. Sampel dari penelitian ini terlalu sedikit yaitu hanya 30 orang responden.

### **C. SARAN**

Berdasarkan keterbatasan tersebut di atas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas cakupan pengguna informasi keuangan, tidak hanya dewan perwakilan rakyat saja tetapi juga meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan investor.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi penggunaan informasi keuangan seperti pengalaman dan pengetahuan pengguna informasi keuangan
3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya selain menggunakan kuesioner digunakan metode pengumpulan data dengan cara survei lapangan dan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang lebih baik dan untuk mendapatkan informasi selain yang telah ada di kuisisioner karena terkadang kuisisioner ada yang tidak kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandary, Himmah, 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Bonner, S.E. dan Lewis, B. 1990. *Determinants Of Audit Experience*. Journal of Accounting Research (Supplement): 1-20.
- Adisti, Dita, 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada DPRD Kota Tasikmalaya). *Skripsi*. Universitas Siliwangi.
- Fontanella, Amy. 2010. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol 5 No.2 Desember 2010 ISSN 1858-3687 hal 22-30.
- Gibbins, M. 1984. *Proposition About The Psychology Of Profesional Judgment In Public Accounting*. Journal of Accounting Research. 103-125.
- Hapsari, Andhisa Setya. 2008. Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK)
- Kawedar, Warsito. Rohman, dan Sri Handayani. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi*
- Libby, R., Luft, J. dan Tan, H. 1995. *Modeling the determinant of audit expertise*. Accounting, Organization and Society. 18, 425-450.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo, 2006, “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik”: Suatu Sarana Good Governace, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No.1, Mei 2006.
- Martiningsih, Sri Pancawati. 2009. “Studi kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mataram*
- Mulyana, Budi, (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2.pp. 65-78.

- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ramadhani, Yesi, 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Provinsi Riau). *Skripsi*. Universitas Riau.
- Rohman, Abdul (2009) Aksesibilitas, Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten Tegal). *Jurnal Akuntansi*. Tahun XIII. No.03, September 2009. Hal 252-264
- Safitri, Ratna Amalia.(2009) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan (Studi Empiris di Kabupaten Semarang). *Hasil penelitian Tidak di Publikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan informasi keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol.2. No.3. Universitas Negeri Padang.
- Scott, W.R., 2003, *Financial Accounting Theory*, 3th Ed, Prentice Hall International, Inc, New Jersey.
- Sujana, Edy. (2002). User's of Public Sector Financial Report Perception of Financial Accountability Reporting of Local Government. *Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik*, Vol.3. No.1.